

REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN DI DEWAN PEMIMPIN WILAYAH PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SUMATERA SELATAN 2019

Apriapamela Yollanda¹, Amalitulwalidain², Kencana Novia³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang.

e-mail: yollandaapria@gmail.com

ABSTRAK

Di negara Indonesia Representasi Politik Perempuan sudah berperan dalam setiap Lembaga partai politik . Hal ini dikarenakan ketentuan dari setiap partai politik sudah ditetapkan yaitu sebanyak 30% keterwakilan perempuan di setiap partai politik. Dengan adanya ketentuan mengenai kuota 30% peneliti ingin mengetahui representasi politik perempuan di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan 2019. Adapun tujuan dikukukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Representasi Politik Perempuan di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan 2019. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan fenomena/kejadian dengan apa adanya, serta menggunakan metode penelitian kualitatif . metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif pada umumnya dengan menggunakan Teknik observasi, wawancara dan study kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu Representasi Politik perempuan di Dewan Pemimpin Wilayah Partai keadilan Sejahtera sudah dapat dikatakan baik, dalam hal ini peneliti menggunakan indikator dari teori Hanna Pitkin dan Budiarmo. Peneliti melihat adanya representasi formal, Representasi fungsi Artikulasi, Representasi Fungsi Agregasi, Representasi Pendidikan Politik.dalam pelaksanaannya kelompok perempuan masih memiliki hambatan yang dialami. Oleh sebab itu Pengurus Dewan Pemimpin Wilayah partai Keadilan Sejahtera terutama Kader perempuan dapat memberikan pembekalan ilmu serta sosialisasi

Kata kunci: Representasi Politik Perempuan ; Kuota 30% ; Partai Keadilan Sejahtera

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sistem kenegaraan kesatuan, yang mana kita ketahui bahwa negara kesatuan tentunya memiliki susunan pemerintahan yang sangat berperan penting dalam sebuah negara. Untuk membentuk susunan pemerintahan negara tentu membutuhkan sebuah organisasi. Adapun organisasi tersebut yaitu partai politik.

Partai politik merupakan sebuah organisasi pemerintah yang bertugas sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dan sebagai sara untuk mendorong akuntabilitas serta pengatur konflik (Imansyah, 2012). Namun dengan adanya partai politik bukan berarti setiap permasalahan dapan di selesaikan langsung.

Terdapat permasalahan yang sulit di pahami oleh kelompok laki-laki yaitu permasalahan yang dialami oleh kelompok perempuan. Maka dari itu begitu pentingnya partai politik apabila terdapat keterwakilan perempuan. Diawal abad-20 melalui pemikiran dari Raden Ajeng Kartini telah menjelaskan bahwa peran politik perempuan dalam struktur politik di Indonesi merupakan salah satu bagian dalam sejarah panjang yang tidak bisa di pungkiri bahwa kaum perempuan juga dapat berkontribusi dalam kekuasaan. Hal ini dapat di lihat melalui fakta sejarah dengan adanya beberapa perempuan yang telah memiliki kedudukan, wewenang, serta berperan penting tertinggi di Nusantara.(Amaliatulwalidain & Kencana, 2019)

Dimasa reformasi tepatnya pada pemilu 2004 negara Indonesia meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dengan diterapkan kebijakan sistem kuota 30%

keterwakilan perempuan pada pencalonan legislatif. (Nurul Layli & Erawati, 2019)

Representasi dapat diartikan sebuah perbuatan yang mewakili, ataupun diwakili dalam keadaan yang bersifat mewakili. Dalam representasi dapat mewakili secara simbol, gambar serta semua hal yang berkaitan dengan hal yang memiliki makna. Namun apabila dilihat secara singkat representasi merupakan tindakan yang menghadirkan atau merepresentasikan sesuatu.

Perbuatan yang mewakili ataupun keadaan yang bersifat mewakili sering kali disebut Representasi. Representasi menurut Hanna Pitkin yaitu salah satu kontribusi utama dalam suatu keterwakilan perempuan. Menurut Pitkin, untuk mendefinisikan Representasi Politik dapat dilihat melalui dimensi dalam keterwakilan politik yaitu Representasi Formal, Representasi Deskriptif, Representasi Substantif dan Representasi Simbolis (fariyanti, 2019). Penjelasannya sebgai berikut:

1. Representasi Formal yaitu dimana agen yang mewakili dengan agen dapat bertindak atas nama konstituennya dengan bertindak memperjungkan kepentingan mereka.(fariyanti, 2019)
2. Representasi simbolik yaitu di mana ide seseorang dapat di representasikan atau yang diwakili secara simbolik. Serta mensubstansi yang diwakili dan simbol mensubstnasi apa yang di simbolkan.
3. Represents deskriptif merupakan

keterwakilan dengan mewakili serta bertindak untuk orang lain, tetapi ia mengatasnamakan orang lain.

4. Representasi substantive yaitu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh wakil itu dilakukan atas nama dan untuk kepentingan yang diwakilinya.

Dalam ini Tornquist (2009), juga menawarkan dua pendekatan yang berbeda dengan Pitkin memberikan pandangan mengenai representasi. Pertama yaitu fokus terhadap rantai kedaulatan raya (*the chain of popular sovereignty*) memiliki macam lembaga lembaga perantara yakni (*intermediary*) yakni organisasi demokratis yang mempunyai ekspresi ide dan memiliki kepentingan kolektif, dapat memilih partai politik serta politisi dengan mengharuskan untuk mengagregasi kepentingan secara kolektif, mengambil keputusan, dapat membuat peraturan, serta pengimplementasian secara legal. Kedua, pendekatan partisipasi secara langsung (*direct participation of the immediety concerned people*) bukan hanya secara mekanisme formal. Dalam pendekatan ini lebih menekankan pada kesepakatan informal (*informal arrangements*), gerakan rakyat (*popular movements*) dan kelompok lobi seperti aksi-aksi kewargaan (*lobby groups as well as civil action*). (Susanti & Lubis, 2015)

Akan tetapi upaya dalam mendorong serta memberi kesempatan perempuan dalam

mengisi posisi-posisi politik semakin terbuka. Ketentuan tersebut terdapat pada UU No 10 Tahun 2008 tentang tentang keterwakilan perempuan terdapat dalam pasal 53 yang berbunyi “bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten atau kota yang ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu untuk setiap daerah pemilihan umum paling sedikit 30% keterwakilan perempuan (Susanti & Lubis, 2015)

Adapun pengertian partai politik menurut Budiardjo (2008), yaitu suatu kelompok terorganisasi yang anggota-anggotannya mempunyai orientasi, nilai serta cita-cita serta mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan mempunyai kekuasaan dalam sebuah kebijakan.(Andriana,2012)

Neumann (1963:352), mendefinisikan partai politik sebagai organisasi aktivis politik yang mengendalikan pemerintahan dan mencari dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan satu atau lebih kelompok (Aulia,2020) Kata pesta berasal dari bahasa Latin pars, yang berarti "bagian". Lebih lanjut Jimly Assiddiqie, mengatakan bahwa partai tersebut juga berasal dari pihak Inggris. Ini berarti bagian atau kelompok. Politik secara etimologis berasal dari kata Yunani polis, yang berarti seluruh kota atau komunitas (Fales, 2018)

Ada begitu banyak partai politik di Indonesia. Partai politik di Indonesia adalah: 1). Partai Politik Nasional Berikut 16 partai

politik nasional yang mengikuti pemilihan umum 2019. 12 dari 16 partai politik berkampanye dalam pemilu terakhir. Namun, beberapa nama kepengurusan berubah tak lama setelah keikutsertaan partai dalam pemilihan federal 2019 diputuskan. Partai politik adalah: a) Partai Rekonstruksi Nasional (PKB) b) GERINDRA c) Partai Demokrat (PDI-P) d) Dewan Pekerja (GOLKAR) e) Partai NasDem (DEMOKRAT NASIONAL) f) Partai Gerakan Transformasi Indonesia (Partai Garuda) g) Pokja h) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) i) Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) j) Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) k) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) l) Partai Amanat Nasional m) Partai Nurani n) Partai Demokrat o) Partai Bulan Bintang p) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2.

Pesta lokal di Aceh. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mencakup pelaksanaan pembentukan partai politik lokal di Aceh (Nurhasim, 2012). Pasal 1 (14) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa partai politik lokal adalah “organisasi politik yang didirikan secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Aceh, berdasarkan kehendak dan cita-cita yang sama, dan DPRA/DPRK melalui pemilihan anggota, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati,

walikota/wakil walikota, anggota, masyarakat ke masyarakat, negara bagian”. Empat partai politik lokal Aceh adalah: sebuah. a) Partai Aceh. b) SIRA-Partai c) Partai Regional Aceh (Regionalpartei Aceh). d) Partai Achenanguro (PNA) (Umagapi, 2020).

Partai politik tentunya memiliki tugas dan fungsi. Adapun tugas dan fungsi partai politik yang di kemukakan oleh Budiajo yaitu:

a. Fungsi Artikulasi

Fungsi artikulasi yaitu sebuah kepentingan yang dilakukan dari proses pengimputan suatu kebutuhan di mana tuntutan dan kepentingan rakyat yang saluran kepada wakil-wakil yang berada di Lembaga legislatif sehingga kepentingan atau tuntutan tersebut dapat terwakilkan dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan pemerintah.

b. Fungsi Agregasi

Fungsi agregasi kepentingan yang merupakan cara bagaimana agar tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat itu, dapat digabungkan menjadi suatu alternatif dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Agregasi kepentingan dijalankan dalam suatu sistem politik yang tidak hanya memperbolehkan terjadinya persaingan antar partai politik secara terbuka, namun juga ikut

mendorong fungsi organisasi pemerintah di tingkat atas untuk mampu dalam melihat kepentingan-kepentingan yang berbeda itu sehingga diperoleh kesepakatan untuk kemudian dapat dilaksanakan.

c. Fungsi Pendidikan Politik

Fungsi pendidikan politik yang dilakukan merupakan suatu cara untuk memperkenalkan sistem dan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut masyarakat dalam sebuah negara. Dengan pembentukan nilai-nilai dan sikap-sikap politik atau dengan kata lain, untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik di harapkan akan terwujud suatu kesadaran politik masyarakat dalam proses bernegara sehingga ketertiban dalam bernegara dapat pula di wujudkan dengan baik.

d. Fungsi Rekrutmen Politik

Tujuan utama dari partai politik yang sekarang ini terlihat dengan kasat mata tidak lain dalam kerangka hanyalah untuk meraih dan atau memperoleh kekuasaan dalam proses politik bernegara. Untuk itu, mereka perlu melakukan suatu proses rekrutmen politik guna memilih kader-kader partai politik terbaik untuk kemudian menempatkannya dalam kekuasaan yang telah diraih atau menang dalam suatu proses

politik yang dilakukan.

Dengan adanya Representasi Politik perempuan permasalahan perempuan satu persatu dapat diatasi dan dapat diselesaikan. Upaya telah dilaksanakan oleh Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera.

Dalam hal ini awal mula masuknya Partai Keadilan Sejahtera ke Sumatera Selatan pada tahun 1998. Peresmian Dewan Pemimpin Wilayah dan Dewan Pemimpin Daerah dilaksanakan di Palembang pada, 4 Oktober 1998 yang pada saat itu masih dengan nama Partai Keadilan Ust. Iqbal Romzie sebagai ketua umum tahun 1998 – 2002. Namun setelah terjadi musyawarah dewan yang membuat perubahan nama partai yang sebelumnya Partai Keadilan Menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada tahun 2003 membuat masa jabatan Ust. Iqbal Romzie di perpanjang dari tahun 2002 hingga 2004. Setelah masa jabatan Ust. Iqbal Romzie selesai, estafet kepemimpinan di lanjutkan oleh Yuswar Hidayatullah yang menjabat sebagai ketua umum dengan masa jabatan 2004 – 2009. Selanjutnya estafet kepemimpinan di lanjutkan oleh Ust. Imam mansyur yang menjabat sebagai ketua umum dengan masa jabatan 2009 – 2014.

Pada tanggal 12–13 Maret 2011 di laksanakan Rakorwil Bidang Perempuan yang di laksanakan di Palembang. Pada tanggal 15 Mei 2011 di laksanakan Rakorwil Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirwasahan yang di laksanakan di Palembang. Setelah

selesai kepemimpinan Ust. Imam Mansyur Estafet Kepemimpinan di lanjutkan oleh Erza Saladin sebagai ketua umum dengan masa jabatan 2014–2018. Pada tanggal 22 April 2017, dilaksanakan pembukaan Rakorwil dan Rakorda Partai Keadilan Sejahtera yang di laksanakan di Hotel Emilia. Kegiatan tersebut di datangi oleh Presiden PKS M. Sohibil Imam yang menjabat pada masa itu, Ustad Suryadi yang melantunkan Ayat Suci Al-Qur'an beliau juga mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Muara Enim dari Partai Keadilan Sejahtera. Setelah selesai kepemimpinan Erza Saladin estafet kepemimpinan di lanjutkan oleh Muhammadiyah Toha dengan masa jabatan 2018 hingga sekarang.

Dengan demikian, partai yang menghadirkan berbasis ideologi peran perempuan dalam proses pengakderan dan pengembangan Partai keadilan sejahtera (PKS) pun tidak dapat diremehkan. Peningkatan persentase struktural partai keadilan Sejahtera meningkat.

Tabel 1.1 Persentase Perempuan dalam Struktur kepengurusan DPP partai politik Periode 2014-2019

(Su
mbe
r,
ram
dha
ni,
202
1)

Partai Politik	Jelang pemilu 2014	Jelang pemilu 2019	Pasca kongres 2019 & 2020
PAN	21,1	29,7	26,5
DEMOKRAT	39,3	30,9	28,0
PDIP	14,8	38,5	34,1
GOLKAR	28,3	30,3	28,8
NASDEM	21,8	36,0	32,1
PKB	22,7	30,7	37,3
GERINDRA	26,4	28,5	25,9
PKS	28,0	32,9	29,8
PPP	24,3	28,8	N/A

Demi peningkatan kualitas partai, Partai Partai Keadilan Sejahtera memiliki Visi dan Misi, Adapun sebagai berikut

a. Visi.

Visi Partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

b. Misi

Misi Partai adalah menjadikan Partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Serta terdapat tujuan dan fungsi Partai keadilan Sejahtera yaitu:

a. Tujuan Partai sebagai berikut:

1. Memenuhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab politik setiap Anggota Partai sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik Anggota Partai dan masyarakat dalam

rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.

3. Memperjuangkan Visi dan Misi Partai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

b. Fungsi partai yaitu

1. Menyelenggarakan pendidikan politik.
2. Menyelenggarakan kaderisasi kepemimpinan bangsa dan negara.
3. Memperjuangkan dan membela kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara melalui jalur politik.
4. Memelihara dan memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Turut membangun etika dan budaya politik yang beradab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Adapun dalam hal ini tujuan peneliti melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat representasi politik perempuan di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan sejahtera Sumatera Selatan 2019

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan pendekatan Deskriptif yaitu merupakan jenis penelitian yang berupaya menggambarkan fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Penulis menggunakan metode penelitian dengan metode kualitatif. Dengan menggunakan

metode kualitatif dengan cara menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Serta menggunakan Teknik *Purposive*, Teknik ini untuk menentukan dan memilih orang-orang yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. (Shidiq & Choiri, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Representasi dan Politik Perempuan dalam Partai Politik

Menurut data sensus penduduk tahun 2020 Jumlah penduduk laki-laki di Indonesia sebanyak 136.66 juta atau 50.58 persen. Sementara jumlah penduduk perempuan di Indonesia sebanyak 133,54 juta atau 49,42 persen lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Namun hal tersebut, bukan menjadi alasan perempuan memiliki pemikiran yang lebih maju. Keterlibatan perempuan dalam partai politik dapat dikatakan masih begitu minim. Serta masih seringkali terjadi keberadaan perempuan dalam partai politik hanya menjadi sebuah simbolik.

Oleh karena itu di Indonesia begitu membutuhkan upaya untuk meningkatkan Representasi Politik Perempuan dengan meningkatkan Representasi Politik sama artinya meningkatkan efektifitas kaum perempuan dalam dunia politik guna untuk meningkatkan kualitas hidup kaum perempuan (Fatmariza,2005)

Menurut Bapak Muhammad Toha dalam wawancara pada 01 Juni 2022, sebagai ketua Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam partai politik begitu penting, selain dapat mengetahui permasalahan yang dialami oleh perempuan juga mereka tentunya dapat memberikan solusi dari permasalahan tersebut.

Untuk mengetahui hasil penelitian peneliti menggunakan indikator teori hanna Pitkin (1967) dan Bodiarjo (1994).

a. Representasi Formal

Representasi Formal yaitu dimana wakil yang mewakili kontituennya secara institusional, tentunya pelaksanaan peraturan dari setiap partai berbeda beda. Namun di dewan Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah memenuhi syarat kuota 30% keterwakilan perempuan sesuai peraturan Undang-Undang yang telah di tetapkan bagi setiap Partai Politik. Keterwakilan perempuan dalam Partai Keadilan Sejahtera terutama di Dewan Pemimpin Wilayah sudah memenuhi syarat karena hampir mencapai 44% dari kepengurusan laki laki. Dengan jumlah anggota dari Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera 55 anggota, sebantak 33 anggota laki-laki dan 22 anggota

perempuan. Apabila di kaitkan dengan teori Hanna Pitkin, dapat dikatakan secara Representasi Perempuan Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera masuk ke dalam Indikator Representasi Formal.

Selain itu dalam proses kaderisasi kader yang ditanggung jawab oleh bidang kaderisasi dengan mengikuti pelatihan yang telah di adakan oleh panitia, selanjutnya setelah menjadi pengurus para anggota dapat bertugas serta bertanggung jawab atas tugas yang telah di berikan.

Dalam proses kaderisasi tentunya kader perempuan memiliki permasalahan yang dihadapi Ketika ingin menjadi pernyalur aspirasi-aspirasi kepentingan dan permasalahan para kaum perempuan. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan teori menurut Hanna Pitkin bahwa alasan kader perempuan untuk menjadi perwakilan perempuan lainnya termasuk kedalam Indikator Representasi Substantif.

Dalam hal ini Kader perempuan yaitu kendala terhadap diri sendiri karena masih begitu banyak kurang tau mengenai ilmu politik, permasalahan ekonomi yang menyulitkan untuk berinteraksi serta perizinan terhadap orang tua dan suami tentunya.

b. Representasi Fungsi Artikulasi

Fungsi Artikulasi dimana terjadinya proses menampung tuntutan dan kepentingan rakyat dengan disalurkan melalui wakil-wakil yang masuk dan duduk di Lembaga legislatif.

Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan memiliki

sembilan yaitu Bidang Kaderisasi, Bidang perempuan dan Ketahanan Keluarga, Bidang Kepanduan, Bidang Kepemudaan, Bidang Pemilihan Umum dan Kepala Daerah, Bidang Hukum dan Kebijakan, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Kepanduan, Bidang pemberdayaan usaha dan ekonomi kader. Namun bidang yang beroperasi dalam partai politik tersebut serta berkaitan dengan perempuan yaitu Bidang Perempuan Dan Ketahanan Keluarga.

Untuk program kerja yang dilaksanakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga tentu banyak sekali. Adapun Program Kerjanya yaitu Family gathering. Program kerja ini bertujuan sebagai menjaga kekeluargaan, komunikasi, sesama anggota dari Dewan pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan.

Selanjutnya Rapat Anggota yang mana rapat anggota tersebut menjadi tempat dari program kerja yang terlaksana dan juga program kerja yang belum terlaksana. Dari rapat anggota juga bidang perempuan dan ketahanan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi kelompok perempuan yang mereka lihat maupun yang permasalahan yang diberitahu oleh masyarakat. Penanganan yang mereka lakukan juga dengan mengkaji permasalahan tersebut, terlebih dahulu lalu permasalahan tersebut nanti akan mereka bahas pada saat rapat anggota kepengurusan bersama pengurus dewan pemimpin wilayah

partai keadilan sejahtera Sumatera Selatan. Setelah selesai bidang perempuan dan ketahanan keluarga akan mendapat arahan untuk menghadapi permasalahan tersebut dan dilanjutkan dengan menangani masalah yang dialami tersebut.

Selanjutnya Rumah Keluarga Indonesia. Program kerja RKI (Rumah Keluarga Indonesia) yaitu yang program kerja yang memberikan banyak penanan terhadap masyarakat terutama kelompok perempuan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh RKI (Rumah Keluarga Indonesia) yaitu parenting, penyuluhan, serta baksos dan pelatihan pra nikah dan pasca nikah. Dalam program kerja RKI juga bidang perempuan membantu para kelompok perempuan dalam pelatihan kepada para kelompok perempuan dan bekerja sama dari DPD dalam pengelolaan minyak jenata dan membantu meningkatkan perekonomian dengan memberikan pelatihan untuk pendirian UMKM pada masa covid.

Selanjutnya senam yang dilakukan minggu ke-2 setiap bulan. Senam pekan ini dilaksanakan dilokasi masing-masing seperti di kantor Dewan Pemimpin daerah, Dewan Pemimpin Cabang namun dikarenakan dari setiap tempat masih ada saja yang tidak melaksanakan senam pagi jadi dari Bidang Perempuan dan ketahanan Keluarga mengaja untuk senam pekan itu dilaksanakan di Kambang Iwak yang telah terlaksanan sejak setelah idul fitri. Selain anggota dari bidang

perempuan dan ketahanan keluarga masyarakat umum juga ikut serta walaupun masih tidak terlalu banyak yang ikut.

Selanjutnya Launcing Forum Ayah, yang bertujuan untuk memberikan sosialisasi pembekalan mengenai pentingnya peran ayah dalam keluarga dalam membina dan keluarag menuju yang tentunya untuk menjadi lebih baik.

Dalam hal ini, peneliti dapat melihat program kerja yang di laksanakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan dapat dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi program kerja yang dilakukan hanya memberikan bekal ilmu secara umum saja. Dari program kerja yang di lakukan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan peneliti tidak menemukan pelatihan-pelatihan yang bersinggungan dengan politik. Karena pemilu sebentar lagi akan dilaksanakan seharusnya dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan dapat memberikan pembekalan mengenai politik kepada masyarakat umum terutama kelompok perempuan.

Dalam hal ini program kerja yang di laksanakan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera

Selatan dapat dikatakan sudah cukup baik, akan tetapi program kerja yang dilakukan hanya memberikan bekal ilmu secara umum saja. Dari program kerja yang di lakukan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan peneliti tidak menemukan pelatihan-pelatihan yang bersinggungan dengan politik. Karena pemilu sebentar lagi akan dilaksanakan seharusnya dari Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan dapat memberikan pembekalan mengenai politik kepada masyarakat umum terutama kelompok perempuan.

c. Representasi Fungsi Agregasi

Fungsi Agregasi merupakan kepentingan tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang apabila digabungkan menjadi alternatif dalam pembuatan kebijakan pemerintahan. Terjadinya fungsi agregasi karena adanya dukungan oleh partai politik secara terbuka. Namun semua tuntutan dan kepentingan seharusnya mencakup dalam usulan kebijaksanaan yang selanjutnya ditetapkan sebagai undang-undang.

Kebijakan terhadap pengkader dan hak menyampaikan suara terhadap perempuan ialah Partai Keadilan Sejahtera dalam kepemimpinan begitu mendukung dengan adanya keterwakilan perempuan dan saat

pengambilan keputusan juga tidak ada perbandingan serta perbedaan, namun dengan mengikuti peraturan yang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga yang telah ditetapkan. Akan tetapi Peraturan Kebijakan yang ada di AD ART untuk saat ini terbilang masih umum dan belum ada peraturan kebijakan yang terkhusus kepada kaum perempuan.

Serta Kebijakan dalam permasalahan yang dialami telah terlaksanakan dalam fungsi agregasi saat ini dapat dikatakan telah terlaksana karena proses yang dilakukan melalui rapat anggota yang dilakukan oleh anggota bidang perempuan dan ketahanan keluarga lalu kajian permasalahan tersebut dibawa dalam rapat kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera lalu setelah itu dari kepengurusan membuka ruang diskusi bersama dengan anggota legislatif dari keterwakilan partai yang kemudian permasalahan kebijakan tersebut dapat dibawa dan dibahas dalam rapat

anggota legislatif. Permasalahan yang dialami seperti meningkatnya harga minyak goreng. Permasalahan tersebut tidak hanya dibawa ke kursi legislatif namun di bahas juga bersama pemerintah.

Sumber: Instagram pks.sumsel



d. Representasi Fungsi Pendidikan Politik

Fungsi Pendidikan politik yaitu dimana suatu cara untuk memperkenalkan sistem dan nilai-nilai politik, sikap politik dan etika politik yang berlaku dan dianut masyarakat

umum dalam sebuah negara. Pendidikan politik juga dapat memberikan peran dalam pengetahuan kepada masyarakat umum.

Fungsi Pendidikan politik terutama dalam partai keadilan sejahtera yaitu terdapat pendidikan yang memberikan edukasi partai politik melalui media sosial seperti instagram, namun terdapat program pendidikan politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera yaitu SCI (Sekolah Cinta Indonesia). Dalam hal ini program pendidikan SCI (Sekolah Cinta Indonesia) disini memberikan materi mengenai kebangsaan, materi keagamaan serta memberikan materi mengenai jadi diri politik. Disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Program Pendidikan SCI (Sekolah Cinta Indonesia) merupakan sebuah sarana yang dilakukan Partai Keadilan sejahtera sebagai memperkenalkan partai politik dengan tujuan menarik perhatian bagi pemilih pemula.

Sumber: Instagram pks.sumsel

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa fungsi Pendidikan politik terutama dalam partai keadilan sejahtera yaitu terdapat pendidikan yang memberikan edukasi partai politik melalui media social seperti instagram, namun terdapat program pendidikan politik yang dilakukan oleh partai keadilan sejahtera yaitu SCI (sekolah cinta Indonesia). Dalam hal ini program pendidikan SCI (Sekolah Cinta Indonesia) disini memberikan materi mengenai kebangsaan, materi keagamaan serta memberikan materi mengenai jadi diri politik. Disini peneliti dapat menyimpulkan bahwa Program Pendidikan SCI (Sekolah Cinta Indonesia) merupakan sebuah sarana yang dilakukan Partai Keadilan sejahtera sebagai memperkenalkan partai politik dengan tujuan menarik perhatian bagi pemilih pemula.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai Representasi Politik Perempuan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Selatan 2019, sudah berjalan dengan baik dan sudah memenuhi syarat 30% kuota perempuan dengan jumlah keseluruhan anggota sebanyak 55 anggota kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah partai Keadilan Sejahtera dengan 33 jumlah kepengurusan laki-laki serta sebanyak 22 anggota perempuan.



Adapun proses kaderisasi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera yaitu dengan proses yang ditanggung jawab oleh bidang kaderisasi dengan mendaftarkan diri, selanjutnya mengikuti pelatihan yang telah didaakan oleh panitia, selanjutnya setelah menjadi pengurus para anggota dapat bertugas serta bertanggung jawab atas tugas yang telah di berikan. Apabila dikaitkan berdasarkan teori Pitkin Representasi Perempuan di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera saat ini sudah memenuhi indikator Representasi Formal yang berarti Representasi sudah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang mana dapat bertindak atas nama yang diwakilinya.

Dari hasil obsevasi dilakukan peneliti mengenai dengan adanya pemenuhan syarat 30% kuota perempuan di Dewan Pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera terdapat bidang yang berfokus kepada permasalahan kaum perempuan yaitu Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga. Dan juga permasalahan yang di alami saat sebelum menjadi anggota dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai keadilan Sejahtera, terutama Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga sendiri tentunya memiliki alasan yang membuat mereka ingin mewakili kelompok perempuan lain dengan permasalahan-permasalahan yang mereka alami tentunya apabila dikaitkan dengan teori Hanna Pitkin yang berarti Dewan Pimpinan Wilayah Partai keadilan Sejahtera terutama Bidang

Perempuan dan Ketahanan Keluarga dapat dikatakan memenuhi syarat Representasi deskriptif yang di mana setiap kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh wakil merupakan untuk kepentingan yang diwakilinya.

Dalam Fungsi Artikulasi juga terdapat program kerja yang berkaitan yaitu program kerja Rapat Anggota. Rapat Anggota disini membahas mengenai proses penanganan permasalahan serta mengkaji permasalahan tersebut sehingga kajian permasalahan tersebut dapat dibahas dan selesaikan sesuai dengan arahan yang diterima. Untuk saat ini Fungsi Artikulasi di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera saat ini sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik dan apabila dikaitkan dengan indikator Hanna Pitkin, Fungsi Artikulasi Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera termasuk dalam indikator representasi Deskriptif. Adapun Fungsi Agregasi yaitu dimana permasalahan yang telah dikaji oleh pengurus partai dapat selesaikan dengan dewan legislatif serta menjadi sebuah Undang-Undang. Untuk saat ini peneliti dapat menyimpikan bahwa Fungsi Agregasi di Dewan pemimpin Wilayah Partai Keadilan Sejahtera masih belum dikatakan baik karena masih terdapat proses agar dapat membuat permasalahan tersebut menjadi sebuah Undang-Undang. Namun apabila permasalahan tersebut dibawa ke pemerintah Dewan Pimpinan wilayah Partai Keadilan Sejahtera untuk saat ini dapat dikatakan sudah

baik, karena permasalahan tersebut dapat ternangani seperti permasalahan naiknya harga minyak goreng. Selanjutnya yaitu Fungsi Pendidikan politik saat ini untuk Dewan Pemimpin Wilayah partai Keadilan Sejahtera saat ini sudah berjalan dengan baik, karena dapat dilihat dari aktifnya media sosial yang memerikan edukasi-edukasi mengenai partai politik serta program pendidikan politik yaitu SCI (Sekolah Cinta Indonesia) dapat kita ketahui bahwa kegiatan program pendidikan tersebut memberikan edukasi materi mengenai kebangsaan, materi keagaam serta materi jati diri Partai Keadilan Sejahtera. Adapun tujuan pembentuka program pendidikan tersebut untuk memberikan edukasi partai politik serta untuk memperkenalkan Partai Keadilan Sejahtera kepada Pemilih Pemula.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amaliatulwalidain, & Kencana, N. (2019). Peranan Politik Gerakan Perempuan Dari Masa Ke Masa (Studi: Tentang Sejarah Organisasi Pkk Di Indonesia). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Global*, 04(01), 2–7. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/679>
- [2] Andriana, N. (n.d.). *Perempuan, partai politik & parlemen : studi kinerja anggota legislatif perempuan di tingkat lokal*. 263.
- [3] Fales, S. (2018). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(2), 199. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i2.2152>
- [4] fariyanti. (2019). No TitleEAENH. In *Ayan* (Vol. 8, Issue 5).
- [5] Fatmariza. (n.d.). *Representasi Perempuan dalam Lembaga Legislatif di Sumatera Barat Pasca Quota 30% Oleh: Fatmariza*. 49–61.
- [6] G/Tsodik, D., Berhane, Y., Worku, A., Luo, D., Cheng, Y., Zhang, H. H., Ba, M., Chen, P., Li, H., Chen, K., Sha, W., Zhang, C., Chen, H. H., Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Ansar J, Dwinata I, M. A., Agus Triono, I. H., Fitriyani, Y., Wuni, C., Wolfe, D. T., ... Haris, A. (2020). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *International Journal of Hypertension*, 1(1), 1–171. <http://etd.eprints.ums.ac.id/14871/%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.cell.2017.12.025%0Ahttp://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/hasil-risikedas-2018.pdf%0Ahttp://www.who.int/about/licensing/%0Ahttp://jukeunila.com/wp-content/uploads/2016/12/Dea>
- [7] Imansyah, T. (2012). Jur na l R ec hts ind ing Jur l R ec hts ind. *Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 375–395.
- [8] Nurul Layli, B. F., & Erawati, M. (2019). Representasi Perempuan Muslim Dalam Kancah Politik. *Qawwam*, 13(2), 85–100. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i2.1663>
- [9] Shidiq, U., & Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- [10] Susanti, S., & Lubis, A. (2015). Partisipasi Politik Perempuan pada Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 1–13. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/906>
- [11] Umagapi, J. L. (2020). *TANTANGAN DAN PELUANG WOMEN ' S REPRESENTATION IN THE 2019 PARLIAMENT ELECTION : dan wakil presiden dan juga pemilihan legislatif di raih Indonesia terkait representasi perempuan di politik , meskipun kenaikannya tidak signifikan hanyalah masalah gender d*. 19–34.
- [12] Ramadhan, Ali, Fahmi. 2021. "peran perempuan dalam politik Di Indonesia." *jurnal Pemuliaan Hukum*14(2): 43-56

